

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN NAGGARAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, KOMITMEN ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)**

Miki Lutfiandri¹⁾, Nasrizal²⁾, Adhitya Agri Putra²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : Mikilutfiandri98@gmail.com

*The Effect Of Participation In Naggaran Development, Functional Supervision, Organizational Commitment And Leadership Style On The Performance Of Local Governments
(Empirical Study on the Regional Apparatus Organization of Pelalawan Regency)*

ABSTRACT

This research was conducted in Pelalawan Regency, Riau Province. The purpose of this study was to test empirically the effect of budgetary participation on the performance of local government agencies (P1) To empirically test the effect of functional supervision on the performance of local government agencies (P2) To test empirically the effect of organizational commitment on the performance of local government agencies (P3) To test empirically the effect of leadership style on the performance of local government agencies (P4). This research is expected to be useful as information material for readers and reference material for interested parties in an effort to improve the performance of a local government agency. The type of data used in this study is primary data. And by using the empirical study method. The variables in this study are Participation in Budgeting (P1) Functional Monitoring (P2) Organizational Commitment (P3) Leadership Style (P3). From the research that has been done, it is found that 1) The results of testing the first hypothesis indicate that budgetary participation affects the performance of the Pelalawan Regency local government. 2) The results of testing the second hypothesis show that functional supervision has no effect on the performance of the Pelalawan district government. 3) The results of testing the third hypothesis that organizational commitment has no effect on the performance of the Pelalawan district government. 4) The results of testing the fourth hypothesis, the leadership style has no effect on the performance of the Pelalawan district government.

Keyword: Participation, Supervision, Commitment, Leadership Style; Local Government Performance.

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada publik/masyarakat. Segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam suatu organisasi sektor publik wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Orang-orang dalam organisasi sektor publik

diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam melayani masyarakat.

Menurut PP No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Mahsun (2012: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

Dikeluarkannya peraturan menteri PAN Nomor PER/09/m.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama pemerintah dan peraturan menteri PAN Nomor 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang disempurnakan dengan peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin memperjelas ukuran-ukuran indikator kinerja yaitu indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penilaian kinerja pada sektor pemerintahan sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu penilaian kinerja pada pemerintahan digunakan

sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada periode yang lalu, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi organisasi selanjutnya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (PERMENPAN,2013).

Secara Empiris Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002) dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal, kepada pusat. Kedua pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas, dan jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja yang dinilai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, kementerian PAN dan reformasi birokrasi (MENPAN& RB) melakukan penilaian terhadap aspek-aspek berikut. Aspek perencanaan (bobot 35%), aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), aspek capaian kinerja (bobot 20%), MENPAN –RB melakukan review atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator kinerja, ketepatannya, pencapaian target, keandalan data, dan keselarasan data dengan capaian sasaran penggunaan dalam dokumen perencanaan (RPJM, RENSTRA). MENPAN-RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan. AA antara 85-100%, A antara 75-85%, B antara 65-75%, CC antara 50-65%, C antara 30-50%, dan D antara 0-30%.

Penyerahan LAKIP di Provinsi Riau tahun 2018 ini dimana Kabupaten Pelalawan mendapat hasil evaluasi dengan predikat CC (50-65%) dimana predikat ini menurun dari tahun 2017 Kabupaten Pelalawan mendapat predikat B (65-75%), dan ditahun 2018 mendapat CC (50-65%). Dari hasil evaluasi tersebut pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu meningkatkan kualitas kinerja, dengan menggunakan anggaran sebaik dan secepat mungkin untuk melakukan penyerapan anggran untuk setiap OPD yang ada hingga memperoleh penilaian yang maksimal dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selain itu Kementrian PAN-RB juga memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan agar setiap pemerintah daerah mamapu meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran (APBD) agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat. (MENPAN-RB)

Melihat fenomena yang terjadi masih banyak pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat kinerja yang memuaskan sehingga harus melakukan perbaikan agar peningkatan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh MENPAN-RB dan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Bastian dan Mahsun dimana ada indikator *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*. Dalaam evaluasi kinerja pemerintah daerah semua akan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dan melihat dari hasil realisasi anggaran (APBD) yang telah di tetapkan.

Dilihat dari fenomena yang terjadi masih adanya kekurangan tentang penyerapan anggaran dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah yang terjadi di Pemkab Pelalawan. Kinerja pemerintah yang baik dapat dinilai dari *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama, di mana alokasi

biaya dan pelayanan yang menekankan pada tiga elemen utama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja dan menjaga aset-aset pemerintah agar tidak disalahgunakan, maka sangat diperlukan peningkatan partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama atau dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh dikemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Partisipasi menunjukan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka. (Poerwati, 2002)

Hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah ini mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Munawar (2006:18) dalam menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja aparat akan meningkat. Hal ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.

Selain mengacu pada teori yang telah dijabarkan, secara empiris hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah ini juga dilihat pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mediaty (2010), Arifin (2012), Putri (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun hasil peneliitian yang berbeda dilakukan oleh Risdiana (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi

penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu pengawasan fungsional. Revindsond (2008;128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Revinsond, 2008;138)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010), menyatakan terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan pengawasan fungsional telah berjalan dengan aturan yang sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian hasil penelitian dari Yogi (2018) juga menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvinda (2014) menyatakan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu komitmen organisasi. Organisasi pemerintah dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab, organisasi tersebut akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money* (efektif, efisien, dan ekonomis). (Mardiasmo,2009).

Value for money akan dapat terwujud jika didukung adanya

komitmen semua individu dalam organisasi atau yang sering disebut komitmen organisasi (Robbins, 2007). Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Robbins dan Judge (2009; 100) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, dalam: komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Robbins dan Judge (2009; 100)

Selain mengacu pada teori, variabel komitmen organisasi ini juga melihat pada hasil penelitian terdulu yang dilakukan dilakukan oleh lestari (2016) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Yogi (2018) dimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu gaya kepemimpinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rivai (2013; 42), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pimpinan ketika mencoba

mempengaruhi kinerja bawahannya. Menurut Thoha (2013; 49), gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Selanjutnya Thoha mengatakan Gaya kepemimpinan suatu organisasi dibutuhkan oleh seseorang pemimpin agar dapat mempengaruhi bawahannya, guna meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian Lestari (2016), dan Yogi (2018) menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2016) tentang pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah manajerial menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

TELAAH PUSTAKA

Teori Stewardship

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama.

Teori stewardship menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama

tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Kinerja Pemerintah Daerah

Mahsun (2012: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangkamewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama atau dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh dikemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Partisipasi menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka.(Poerwati, 2002)

Pengertian Pengawasan Fungsional

Revindsond (2008;128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Komitmen Organisasi

Robbins dan Judge (2009; 100) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, dalam: komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

Pengertian Gaya kepemimpinan

Menurut Rivai (2013; 42), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pimpinan ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama atau dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh dikemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Partisipasi menunjukan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka. (Poerwati, 2002)

Untuk hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah ini mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Munawar (2006:18) dalam menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja aparat akan meningkat. Hal ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka aparat akan

menginternalisasikan tujuan dan standar yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.

Selain mengacu pada teori yang telah dijabarkan, secara empiris hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah ini juga dilihat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mediaty (2010), Arifin (2012), Putri (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Halim dan Syam (2017: 145) pengawasan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk melihat kinerja.

Revindsond (2008:128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah, maupun lingkungan eksternal pemerintah dan

pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu periode tertentu (Revinsond,2008;138).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010), menyatakan terdapat pengaruh pengawasan fungsioanal terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan pengawasan fungsional telah berjalan dengan aturan yang sesuai yang telah ditetapkan. Kemudian hasil penelitian dari Yogi (2018) juga menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi. Organisasi pemerintah dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab, organisasi tersebut akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada *value for money* (efektif, efisien, dan ekonomis) (Mardiasmo,2009).

Value for money akan dapat terwujud jika didukung adanya komitmen semua individu dalam organisasi atau yang sering disebut komitmen organisasi (Robbins, 2007). Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisai, menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Organisasi harus memberi perhatian yang penuh dan membuat karyawan percaya terhadap orgamnisasi,sehingga akan diperoleh komitmen karyawan. Jika komitmen karyawan telah diperoleh akan didapatkan karyawan yang setia, dan mampu bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan organisasi, karena organisasi mendapat dukungan penuh dari anggotanya sehingga bisa berkonsentrasi secara penuh terhadap tujuan yang di prioritaskan.

Robbins dan Judge (2009; 100) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, dalam: komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Yogi (2018) dimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, apabila komitmen organisasinya baik, maka kinerja pemerintah daerah akan baik pula. Berdasarkan uraian untuk variabel komitmen organisasi maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Rivai (2013; 42), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pimpinan ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Menurut thoha (2013; 49), gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Gaya kepemimpinan suatu organisasi dibutuhkan oleh seseorang pemimpin agar dapat mempengaruhi bawahannya, guna meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian Lestari (2016), dan Yogi (2018) menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh tanggung jawab terhadap pekerjaan, mampu mengamati lingkungan kerja, mengamati kondisi kerja, prestasi kerja, mampu menentukan prioritas kerja dan prioritas keputusan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka hipotesis untuk variabel gaya kepemimpinan adalah:

H₄ : gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 43 Instansi yang terdiri dari : Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, I sekretariat Daerah, dan Inspektorat. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan selesai..

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 43 OPD yang terdiri dari : Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, I sekretariat Daerah, dan Inspektorat.

Menurut sugiyono (2014;116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*,

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2014:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja pemerintah daerah adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi ini dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.(Surjadi 2009:7). Indikator dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah mengacu pada teori yang dikemukakan oleh mahsun (2012; 148) indikator dari kinerja pemerintah daerah yaitu: input, proses, output, outcomes, benefit.

Dalam menjawab kuesioner responden akan menggunakan *skala ordinal*, yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan juga pendapat. Skala penilaian ini dari 1 hingga 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga sangat setuju.

Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₁)

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama atau dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh dikemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Partisipasi menunjukkan pada luasnya partisipasi

bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat bertanggung jawaban anggaran mereka. (Poerwati, 2002)

Dalam menjawab kuesioner responden akan menggunakan *skala ordinal*, yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan juga pendapat. Skala penilaian ini dari 1 hingga 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga sangat setuju.

Komitmen Organisasi (X₃)

Robbins dan Judge (2009; 100) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, dalam: komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi. Dimana loyalitas, keterlibatan, dan penerimaan terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

Indikator Komitmen Organisasi Menurut Sopiah (2008) komitmen organisasi memiliki tiga indikator yaitu: kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, dan kebanggaan karyawan.

Dalam menjawab kuesioner responden akan menggunakan *skala ordinal*, yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan juga pendapat. Skala penilaian ini dari 1 hingga 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga sangat setuju

Gaya kepemimpinan (X₄)

Rivai (2013; 42), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pimpinan ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya

Dalam menjawab kuesioner responden akan menggunakan *skala ordinal*, yaitu skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan

juga pendapat. Skala penilaian ini dari 1 hingga 5 untuk menjawab pertanyaan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, hingga sangat setuju

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam persamaan satu berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = *kinerja pemerintah daerah*

α = konstanta

β = koefisien regresi

X_1 = partisipasi penyusunan anggaran

X_2 = pengawasan fungsional

X_3 = komitmen organisasi

X_4 = gaya kepemimpinan

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 43 OPD yang terdiri dari : Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, sekretariat Daerah, dan Inspektorat. Pada penelitian ini karakter sampel pada penelitian ini yaitu OPD Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dengan jumlah sampel 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masing-masing OPD diambil 3 orang sebagai responden, sehingga total responden 90 responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian program instansi pemerintah.

Hasil Statistik Deskriptif

Merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian, tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami data, dimulai dari jumlah data (N), Nilai Rata-

Rata (Mean), Nilai Maksimum, Nilai Minimum, dan Standar Penyimpangan Data (Std Deviasi). Statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kinerja pemerintah daerah	72	22.00	55.00	42.6250	7.45963
partisipasi penyusunan anggaran	72	8.00	20.00	15.2500	2.96339
Pengawasan fungsional	72	28.00	80.00	58.1528	12.23900
komitmen organisasi	72	20.00	40.00	30.0000	4.13845
gaya kepemimpinan	72	25.00	55.00	39.9722	4.50030
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Data Olahan 2020

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas data menggunakan *corrected item-total correlation* diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kinerja instansi pemerintah (Y), partisipasi penyusunan anggaran (X1), pengawasan fungsional (X2), komitmen organisasi (X3) dan gaya kepemimpinan (X4) dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh r hitung $> r$ tabel yang berarti bahwa data valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Gozali (2013:48), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yakni mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat diandalkan. Suatu variabel dikatakan *cronbach alpha* jika memiliki nilai lebih dari 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal. Semakin dekat dengan *cronbach alpha* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal.

Tabel 2 Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Nilai kritis	kesimpulan
Kinerja pemerintah	0.893	0,60	Reliabel
Partisipasi penyusunan anggaran	0.754	0,60	Reliabel
Pengawasan fungsional	0.934	0,60	Reliabel
Komitmen organisasi	0.806	0,60	Reliabel
Gaya kepemimpinan	0.711	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yang terdiri dari kinerja pemerintah, partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan penelitian telah memenuhi kriteria uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

4.3 Uji asumsi klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Partisipasi Penyusunan Anggaran	Pengawasan Fungsional	Komitmen Organisasi	Gaya Kepemimpinan
N	72	72	72	72
Normal Parameters ^a				
Mean	.0000000	.0000000	.0000000	.0000000
Std. Deviation	4.61709823	6.68458322	7.45361863	7.27087351
Most Extreme Absolute Differences				
Positive	.059	.120	.101	.097
Negative	.055	.070	.068	.060
Kolmogorov-Smirnov Z	-.059	-.120	-.101	-.097
Asymp. Sig. (2-tailed)	.498	1.018	.856	.824
	.965	.251	.456	.505

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Olahan 2020

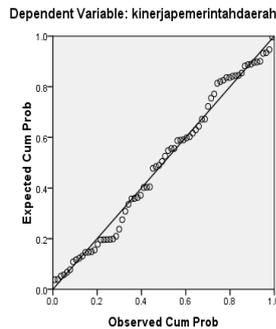
Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas, tingkat signifikansi dari masing variabel partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan $> 0,05$, yang mana nilai sig variabel tersebut secara berturut-turut yaitu 0,965, 0,251, 0,456, 0,505

dan 0.641 sehingga dapat di simpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Disamping itu model regresi yang terdistribusi normal atau mendekati normal dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018:147). Pada penelitian ini hasil uji normalitas data dapat dilihat dari Gambar 1 berikut.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Olahan 2020

Hasil uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Partisipasi penyusunan anggaran	0.587	1.703
Pengawasan fungsional	0.589	1.699
Komitmen organisasi	0.775	1.291
Gaya kepemimpinan	0.773	1.294

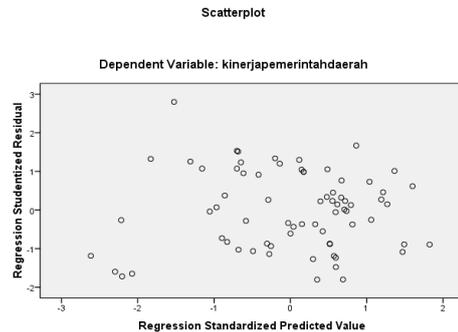
a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua nilai *tolerance* berada diatas atau > dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan dibawah < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinieritas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan 2020

Hasil uji *scatterplot* pada gambar 2 menunjukkan bahwa data sampel tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	25.727	7.196		3.575	.001
Partisipasi penyusunan anggaran	2.090	0.301	.859	6.932	0.000
Pengawasan fungsional	-0.020	0.071	-.037	-.282	0.779
Komitmen organisasi	-0.462	0.184	-.258	-2.516	0.160
Gaya kepemimpinan	0.005	0.147	.003	.034	0.973

a. Dependent Variable: kinerja pemerintah daerah

Sumber: Data Olahan 2020

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.669	.649	4.41902

a. Predictors: (Constant), gaya kepemimpinan, pengawasan fungsional, komitmen organisasi, partisipasi penyusunan anggaran

Sumber: Data Olahan 2020

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa besar nilai *Adjusted R Square* (R^2) adalah sebesar 0,649. Hal ini menunjukkan bahwa 64,9% variabel partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan sisanya 35,1% kinerja pemerintah dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

PEMBAHASAN

pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah (H_1)

H_0 : partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

H_1 : partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

Dapat diketahui bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran (X_1) dengan nilai $t_{hitung} 6.932 > t_{tabel} 1,996$ serta sig sebesar $0,000 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai p_{value} lebih kecil dari nilai α 0.05 dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima maka hasil dari penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mediaty (2010), Arifin

(2012), Putri (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah (H_2)

H_0 : pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

H_2 : pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

Dapat diketahui bahwa variabel pengawasan fungsional (X_2) dengan nilai $t_{hitung} -0,282 < t_{tabel} 1,996$ atau $sig 0,779 > 0,05$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai p_{value} lebih besar dari nilai α 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan ditolak, yang berarti bahwa variabel pengawasan fungsional (X_2) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Organisasi Perangkat Daerah kabupaten pelalawan telah melaksanakan pengawasan fungsional, tetapi penerapan pengawasan fungsional itu sendiri dinilai masih kurang optimal. Dimana masih terdapat beberapa penyalahgunaan wewenang kekuasaan, dan masih ada beberapa pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja. Secara langsung masih diperlukan upaya peningkatan. Seharusnya pengawasan fungsional dalam suatu instansi pemerintah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil pada penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dimana pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvinda (2014) menyatakan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah (H₃)

H₀ : komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

H₃ : komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah

Dapat diketahui bahwa variabel komitmen organisasi (X₃) dengan nilai $t_{hitung} -2,516 < t_{tabel} 1,996$ atau *sig* sebesar $0,160 > 0,05$ Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai p_{value} lebih besar dari nilai alfa 0.05. maka H₀ diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat $sig > \alpha 0,05$ maka secara parsial variabel komitmen organisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun individu di Organisasi Perangkat Daerah kabupaten pelalawan telah melaksanakan pekerjaan di setiap OPD dengan baik, namun komitmen organisasi setiap individu berbeda. Secara spesifik seharusnya setiap individu melaksanakan setiap pekerjaannya dengan ikhlas tanpa keterpaksaan agar dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Dari hasil jawaban kuisioner yang telah dilakukan oleh peneliti masih terdapat bahwa beberapa pegawai yang terdapat di OPD pelalawan yang masih melakukan pekerjaannya dengan keterpaksaan dan masih belum memberikan loyalitas terhadap OPD yang ada di kabupaten pelalawan tersebut.

Hasil dari penelitian ini berbeda, dimana hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah (H₄)

H₀ : gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

H₄ : gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah

Dapat diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan (X₄) dengan nilai $t_{hitung} 0,034 < t_{tabel} 1,996$ atau *sig* sebesar $0,973 > 0,05$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai p_{value} lebih besar dari nilai alfa 0.05. maka H₀ diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat $sig > \alpha 0,05$ maka variabel gaya kepemimpinan tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini adalah dimana gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, hal ini dapat dilihat dari hasil peneliti yang dilakukan dilapangan dengan jawaban kuisioner yang telah diberikan terhadap responden, dimana untuk pernyataan di dalam kuisioner tentang gaya kepemimpinan, para responden menjawab dengan netral dan menjalankan tugas itu hanya dengan keterpaksaan bukan sebagai kewajiban.

Pada hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hakim (2016) tentang pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah manajerial menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, pengawasan fungsional, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten pelalawan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui penyebaran kuisioner, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan situasi yang sebenarnya, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengendalikan jawaban responden
2. Dalam penelitian ini objek penelitian hanya di ruang lingkup OPD kabupaten pelalawan dengan responden masing-masing OPD 3 responden.
3. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel terikat tanpa ada memasukkan jenis variabel lain. sehingga kemungkinan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode wawancara secara langsung agar tidak bias informasi dan mendapatkan data yang valid.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel atau dengan menambah ruang lingkup objek penelitian, karena dalam penelitian hanya berjumlah 3 responden di setiap OPD sehingga belum dapat mewakili populasi lain yang ada.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel baru seperti pemanfaatan teknologi, dan masih banyak variabel lain yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* (Studi Pada Inspektorat Prmowovinsi Jawa Barat)
- Arifin W. Benny. 2012. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Universitas Gajah Mada. Yogyakarta*
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Satuan Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Hakim, Lukmanul. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional, Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Kuantang Sengingi)*
- Harvinda, Yulia Petra. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)*
- Harvinda, Yulia Petra. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)*
- Kurniawan, Muhammad Rizki Nur. 2011. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)*.
- Lestari, Yuni. 2016. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)*
- Mahsun, Mohamad, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2002. *Serial Otonomi Daerah. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Mediaty Dan Syarifuddin. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel)*. Jurnal Ekonomi. Sulawesi Selatan.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta.
- Poerwati, Tjahjaning, 2002, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Budaya Organisasi Dan Motivasi Sebagai Variabel Moderating*, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang 5-6 September 2002.
- Revinsond, Baswir. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta.
- Risdiana. Purwita. 2018. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rivai, Z, Veithzal, Dkk. 2013. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins SP, Dan Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.